

KABUYUTAN CIPAGERAN CIMAH DARI ZAMAN KE ZAMAN

KABUYUTAN CIPAGERAN CIMAH FROM TIME TO TIME

Leli Yulifar

Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudi 229 Bandung
e-mail: leli_yulifar@upi.edu

Naskah Diterima: 28 Juli 2018

Naskah Direvisi: 22 Oktober 2018

Naskah Disetujui: 8 November 2018

Abstrak

Komunitas Kabuyutan Cipageran Cimahi layaknya "museum" hidup yang menghubungkan masa lalu dan kini. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asal-usul dan eksistensi Kabuyutan Cipageran. Metode penelitian sejarah yang dimulai dari heuristik sampai dengan historiografi merupakan tahapan yang tidak mudah dilewati, mengingat keterbatasan sumber, terutama sumber tertulis. Melalui teknik pengumpulan data berupa sumber tertulis/dokumentasi, wawancara terhadap empat narasumber yakni pupuhu (tokoh), budayawan, wakil komunitas kabuyutan, dan observasi di lapangan, ditemukan bahwa Kabuyutan Cipageran diduga kuat mulai ada sejak zaman Kerajaan Sunda yang eksis antara akhir abad ke-7 sampai akhir abad ke-16. Mengacu pada perjalanan sejarahnya, Kabuyutan Cipageran merupakan salah satu bukti adanya tempat leluhur Sunda, dan replika kampung Sunda tempo dulu. Amanat leluhur Sunda yang sangat dihormati oleh generasi penerusnya, menunjukkan nilai-nilai tinggi dan strategis dalam kebudayaan, khususnya kebudayaan Sunda. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjawab asal-usul Komunitas Kabuyutan dan sebagai bahan awal yang tertulis untuk penelitian selanjutnya.

Kata Kunci : *Kabuyutan, replika, dan Kebudayaan Sunda.*

Abstract

Kabuyutan Cipageran Cimahi Community is like a living "museum" that connects the past and present. Therefore, this study aims to determine the origin and existence of Kabuyutan Cipageran. Historical research methods starting from heuristics to historiography are stages that are not easily passed, given the limited resources, especially written sources. From some techniques of collecting data; in the form of written or documentation sources, interviews with four speakers, pupuhu (figures), cultural observers, representatives of the Kabuyutan community, and observations in the field, it was found that Kabuyutan Cipageran was strongly suspected to have existed since the 7th century of Sunda Empire to the end of the 16th century. Referring to its historical journey, Kabuyutan Cipageran is one proof of the existence of a Sundanese ancestral place, and a replica of the old Sundanese village. The mandate of Sundanese ancestors who are highly respected by their next generation shows high and strategic values in culture, especially Sundanese culture. The results of the study are expected to be able to answer the origins of the Kabuyutan Community as well as the starting written material for further research.

Keywords: *Kabuyutan, replicas and Sundanese culture.*

A. PENDAHULUAN

Berdasar kepada informasi dari berbagai sumber sejarah baik berupa prasasti, di Tatar Sunda/Jawa Barat, maupun dari sumber-sumber tertulis

lainnya, *kabuyutan* sebagai sebuah tempat mulai dikenal sekitar abad ke-11 M. Tetapi kemunculan *Kabuyutan* Cipageran bisa jadi jauh lebih awal dari yang diperkirakan. Namun sampai sekarang

belum ada penelitian secara khusus mengenai Kabuyutan Cipageran. Oleh karena itu, warga Kabuyutan Cipageran sekarang seolah-olah “*pareumeun obor*” (kehilangan jejak) mengenai asal-usul *kabuyutan* dan para leluhurnya.

Faktor utama yang menyebabkan belum diketahuinya asal-usul dan eksistensi Kabuyutan Cipageran tempo dulu, adalah belum ditemukannya sumber akurat yang memuat data/informasi mengenai Kabuyutan Cipageran tempo dulu. Hal itu menjadi keprihatinan bagi warga *Kabuyutan* Cipageran sekarang, karena keberadaan mereka yang memiliki ciri-ciri komunitas yang menjunjung tinggi adat-istiadat dari para leluhur masing relatif dipertahankan kendati berada di tengah-tengah kemajuan zaman dan hingar-bingarnya suasana kota- yang tidak jauh dari lingkungan di mana mereka berada- bahkan sebagian besar dari mereka mencoba untuk melestarikan ‘*marwah*’ Kabuyutan baik dengan mempertahankan simbol-simbol dan adat istiadat yang berdampingan dengan munculnya pengaruh kekinian (arus modernisasi) maupun melalui penggalan terhadap makna kabuyutan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keberadaan komunitas ini merupakan bukti bahwa tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kontinuitas dari masa sebelumnya yang menempati *space* (ruang) dan *time*. Oleh karena sistematika sejarah itu dibangun oleh kronologi waktu (Barnes, 1963: 12), maka rekonstruksi asal mula dan tumbuh kembangnya komunitas kabuyutan disusun dalam *time line* selama lima zaman.

Atas dasar itulah tulisan ini disusun, yang sebagian besar sumbernya dikembangkan dari studi pendahuluan dan penelitian pada tahap berikutnya dengan mencoba melihat asal-usul, perkembangan, serta fungsi dan kedudukan Kabuyutan Cipageran dulu dan kini, ditambah dengan wawancara kepada para informan, baik sejarawan, budayawan dan komunitas masyarakat adat Kabuyutan di daerah

Kabuyutan Cipageran Cimahi dan Kabuyutan Gegerkalong - yang diyakini masih merupakan satu garis keturunan, di samping studi dokumentasi yang berkenaan dengan tulisan yang membahas Kabuyutan di Tanah Sunda lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mengungkap asal-usul Kabuyutan Cipageran dan eksistensinya pada zaman dulu, metode penelitian yang harus digunakan adalah metode sejarah. Dalam penelitian ini, metode sejarah itu hanya bersifat sederhana. Sumber tertulis yang ditelaah, baik jenis maupun jumlahnya sangat terbatas. Metode itu ditunjang oleh metode wawancara, yaitu wawancara dengan empat orang informan untuk memperoleh informasi lisan, ditunjang oleh kegiatan survei lapangan. Oleh karena sumber tertulis yang memuat data/informasi mengenai Kabuyutan Cipageran sulit ditemukan, maka terhadap hal tertentu dilakukan interpretasi secara rasional. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengungkapkan permasalahan pada masa lampau, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah. Pencarian sumber berpatokan pada ragangan (*outline*), walaupun masih bersifat sementara, karena ragangan itu akan menunjukkan data apa yang diperlukan. Data itu tentu harus dicari dalam sumber tertulis. Terhadap sumber-sumber yang diperoleh kemudian dilakukan kritik sumber dari segi internal dan eksternal, untuk mengetahui otentisitas sumber dan kredibilitas data di dalamnya (Garaghan, 1946 :103-426, Gottschalk, 1986: 32, Kuntowijoyo, 1995: 95, Renier, 1997: 118).

Dalam pengolahan data, dilakukan interpretasi untuk memperoleh fakta sejarah mengenai permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh fakta sejarah mengenai hal tertentu, dilakukan *koroborasi* (*Corroboration*) suatu data dari suatu sumber sejarah dengan sumber lain, dua atau lebih (Lubis, 1998: 34). Tahap akhir adalah *historiografi*, yakni menyusun

rekonstruksi Sejarah Kabuyutan secara sistematis dan kronologis berdasarkan fakta yang telah diseleksi, sehingga dihasilkan tulisan sejarah yang dikemas dalam bahasa ilmiah populer.

Selanjutnya, untuk mempertajam analisis dilakukan pendekatan dengan menggunakan teori dan atau konsep dari disiplin ilmu yang relevan, seperti sosiologi, ekonomi dan politik. Dengan demikian akan diperoleh eksplanasi mengenai masalah yang dibahas. Hal itu sesuai dengan tuntutan penulisan sejarah ilmiah. Penulisan sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu bantu (*sister disciplines*), secara teori akan memperkuat metodologi sejarah dengan pendekatan interdisipliner, sehingga penulisan sejarah yang terstruktur dapat menemukan objektivitas kesejarahan yang faktual (Sjamsuddin, 2016: 240). Melalui metode sejarah dan pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan dinamika Kabuyutan di daerah Cimahi akan terdeskripsikan dengan logis dan ilmiah.

Penelitian ini membicarakan latar belakang kemunculan Kabuyutan Cipageran serta eksistensi, kedudukan, dan makna kabuyutan dulu dan sekarang. Untuk memahami apa itu *kabuyutan*, dijelaskan pengertian dari istilah Kabuyutan serta maknanya terlebih dahulu.

Dengan demikian, kendati tulisan ini uraiannya masih sederhana, namun kiranya tetap memiliki kegunaan. Pertama, untuk menambah pengetahuan, khususnya bagi warga Kabuyutan Cipageran mengenai gambaran asal-usul kabuyutan tersebut. Kedua, sebagai dokumentasi tertulis awal yang menulis tentang keberadaan komunitas adat ini, dan sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai Kabuyutan Cipageran. Ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengembangkan destinasi wisata di kawasan ini. Seperti yang kita ketahui bersama, sektor wisata berbasis budaya/kearifan lokal dewasa ini banyak diandalkan negara-negara di berbagai

kawasan - terutama kawasan Asia - termasuk negara-negara yang secara ekonomi jauh lebih maju dibanding negara kita - dan bahkan mendapat sebutan 'macam Asia' seperti Korea- tetap melestarikan budaya lokalnya yang kemudian 'dikemas' ke dalam bentuk wisata sejarah/budaya yang menghasilkan devisa. Dengan demikian, bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus: pertama dapat melestarikan warisan budaya/*heritage* bangsa. Kedua, mensejahterakan masyarakat.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam kondisi sekarang, di pusat Kabuyutan Cipageran, yang berada di Wilayah Cimahi Utara, tepatnya di Jalan Kolonel Masturi Km.3 berdiri bangunan dengan arsitektur tradisional pada lahan yang agak tinggi. Badan bangunan menggunakan *awi* (bambu) dan atap bangunan dari alang-alang. Sementara di pelataran bangunan bagian bawah, terdapat tugu batu. Hal itu menunjukkan bahwa budaya kabuyutan mengadopsi budaya megalit.

2. Kedudukan dan Fungsi Kabuyutan

a. Asal Mula Istilah Kabuyutan

Awal keberadaan kabuyutan di Tatar Sunda/Jawa Barat termasuk Kabuyutan Cipageran di daerah Cimahi, memiliki latar belakang yang mencakup waktu jauh ke belakang. Hal itu terkait dengan asal-usul daerah yang sekarang bernama Cimahi.

Kabuyutan Cipageran memiliki perjalanan sejarah sangat panjang, hampir mencakup 3 zaman. Karena berdasarkan sumber sejarah, yakni sebagai sumber tertulis pertama yang menyebut istilah *kabuyutan* itu mulai eksis sekitar abad ke-11, pada zaman Kerajaan Sunda (yang berlangsung sejak akhir abad ke-7 sampai dengan akhir abad ke-16). Oleh karena itu, dimungkinkan istilah dan keberadaan kabuyutan sudah jauh lebih awal dari kemunculan istilah yang tertulis pada

prasasti untuk pertama kalinya (Prasasti Cibadak).

Dalam kondisi sekarang, Kabuyutan Cipageran termasuk ke dalam wilayah administratif Pemkot (Pemerintah Kota) Cimahi, tepatnya bagian dari wilayah Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Berarti sampai sekarang perjalanan sejarah Kabuyutan Cipageran melalui tiga zaman, yaitu zaman kerajaan, zaman penjajahan, dan zaman kemerdekaan. Dengan kata lain, eksistensi Kabuyutan Cipageran berlangsung pada zaman dulu dan zaman sekarang.

Sejak dulu sampai sekarang, Cimahi masuk ke dalam wilayah Jawa Barat. Ditemukannya benda-benda peninggalan budaya zaman prasejarah dan fosil manusia prasejarah di beberapa tempat di Jawa Barat, menunjukkan bahwa daerah Jawa Barat pernah ditinggali oleh manusia prasejarah. Zaman Prasejarah terbagi atas Zaman Batu Tua (*Paleolitikum*), Zaman Batu Tengah (*Mesolitikum*), Zaman Batu Baru (*Neolitikum*), dan Zaman Logam (*Perundagian*) (Soekmono, 1995, Jilid I, Kartodirdjo, 1975, Jilid I, PaEni 2009).

Pada zaman Mesolitikum yang diperkirakan berlangsung antara 4.000 sampai dengan 10.000 tahun sebelum masehi, Gunung Sunda di dataran tinggi Bandung meletus. Sebagian laharnya menyumbat aliran Sungai Cilameta di daerah Padalarang sekarang, tepatnya di tempat yang dikenal dengan sebutan “Sanghiyang Tikoro”. Akibatnya, lama kelamaan air sungai itu menggenangi dataran tinggi Bandung seluas lebih-kurang 150 kilometer persegi. Dalam kondisi sekarang genangan air danau itu meliputi daerah antara Padalarang sampai Cicalengka, dan daerah Lembang hingga Soreang. Daerah seluas itu menjadi “danau raksasa” yang biasa disebut “Danau Bandung Purba”. Keberadaan danau itu berlangsung dalam waktu sangat lama. Dalam bidang geologi, daerah di tepian danau itu disebut Cekungan Bandung, yakni area yang secara morfologis berbentuk lembah, yang meliputi tempat-

tempat yang sekarang bernama Padalarang, Cimahi, Lembang, Banjaran, Soreang, Majalaya, Ciparay, Cililin, Ujungberung, Cicalengka, Dago, bahkan Nagreg.

Peta di bawah menunjukkan tempat yang sekarang bernama Cimahi berada di daerah Cekungan Bandung bagian utara, dan Gua Pawon di tepian “Danau Bandung Purba” bagian barat. Berdasarkan hasil penelitian geologi dan arkeologi, antara lain yang dilakukan oleh G.H.R. von Koeningswald dan R.W. Bemmelen, di daerah Cekungan Bandung ditemukan benda-benda peninggalan manusia prasejarah, berupa alat-alat dari batu obsidian. Di daerah itu ditemukan pula sampah dapur (*kyokenmodinger*) dari kehidupan manusia prasejarah, antara lain berupa kulit kerang.

Temuan-temuan itu secara tidak langsung menunjukkan beberapa daerah di tepian Danau Bandung pernah menjadi pemukiman manusia prasejarah, karena danau itu sangat penting artinya bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, di Tatar Sunda/Jawa Barat banyak tempat yang namanya diawali oleh kata *ci* yang berarti air. Selain untuk kebutuhan air, di danau purba itu manusia prasejarah dapat melakukan penangkapan ikan. Memang menangkap ikan adalah satu budaya manusia prasejarah sejak Zaman *Paleolitikum* (Zaman Batu Tua).



Gambar 1. Peta Danau Bandung Purba
Sumber: T. Bachtiar (Juli 2005) dalam
Hardjasaputra dan Yulifar (2017)

Pada akhir Zaman *Mesolitikum*, manusia prasejarah kehidupannya tidak lagi berpindah-pindah tempat (*nomaden*),

tetapi sudah tinggal menetap di suatu daerah. Maka tidaklah mustahil bila Cimahi pun yang merupakan bagian dari wilayah Cekungan Bandung, pernah ditinggali oleh manusia prasejarah Zaman Mesolitikum.

Bahwa daerah Cekungan Bandung pernah dihuni oleh manusia prasejarah, antara lain dibuktikan pula oleh keberadaan fosil manusia purba di Gua Pawon daerah Padalarang. Hasil kajian sementara pakar arkeologi dari Balai Arkeologi Bandung, yaitu Tony Djubiantoro (alm.) dan Lutfi Yondri, fosil manusia di Gua Pawon adalah fosil manusia prasejarah Zaman Mesolitikum. Namun, tempat pemukiman manusia prasejarah waktu itu belum memiliki nama, karena mereka belum mengenal bahasa. Berarti Cimahi baru menjadi nama tempat di bekas Cekungan Bandung setelah tempat itu menjadi pemukiman sekelompok manusia Sunda yang telah memiliki bahasa.

Dalam kehidupan masyarakat Sunda, bisa jadi konsep *kabuyutan* mulai ada pada zaman kerajaan yang bercorak Hindu-Budha, tetapi penyebutan *kabuyutan* secara tertulis baru ditemukan pada abad ke-11 M. Kerajaan Hindu-Budha yang pernah eksis di daerah Jawa Barat adalah Kerajaan Tarumanagara (abad ke-4 hingga pertengahan abad ke-7), Kerajaan Galuh (awal abad ke-7 hingga akhir abad ke-16), dan Kerajaan Sunda/Pajajaran (akhir abad ke-7 hingga akhir abad ke-16) (Soekmono, 1995, Jilid II, Kartodirdjo, 1975, Jilid I, PaEni, 2009)

Pada zaman Kerajaan Tarumanagara, warga masyarakat kerajaan itu belum menyebut dirinya orang Sunda. Sebutan masyarakat Sunda baru terjadi seiring dengan eksistensi Kerajaan Sunda yang merupakan penerus Kerajaan Tarumanagara, karena kerajaan itu didirikan oleh raja terakhir Tarumanagara, yaitu Maharaja Tarusbawa.

Ketika Kerajaan Sunda dipimpin oleh Sri Jayabhupati, Raja Sunda ke-19

(1030-1042 M.), pada awal pemerintahan sang raja menyatakan sebagian dari daerah Sungai Sanghyang Tapak ditetapkan sebagai *kabuyutan*, yaitu tempat yang memiliki pantangan (tabu) yang harus ditaati oleh seluruh rakyatnya. Pernyataan Raja Sunda dalam prasasti tersebut, terjemahannya dalam bahasa Indonesia, antara lain sebagai berikut:

Selamat, pada tahun Saka 952 bulan Kartika tanggal 12 bagian terang hari *hariyangkliwon-Ahad wuku tambir*. Inilah saat raja Sunda Maharaja Sri Jayabhupati Jayamanahen Wisnumurti Samarawijaya Sakalabuana-mandaleswaranindita Harogowardana Wikramotunggadewa membuat tanda di sebelah timur Sanghyang Tapak, dibuat oleh Sri Jayabhupati Raja Sunda, dan jangan ada yang melanggar ketentuan di sungai ini. Jangan ada yang menangkap ikan di bagian sungai ini mulai dari batas daerah Kabuyutan Sanghyang Tapak di bagian hulu (Danasasmita, 1984).

Keterangan tersebut menunjukkan dua hal. Pertama, *kabuyutan* di wilayah Kerajaan Sunda mulai ada paling tidak sejak awal abad ke-11 M. Kedua, pengertian *kabuyutan*, yaitu tempat tertentu yang memiliki makna sakral. Pengertian *kabuyutan* demikian itu, mengandung kearifan raja untuk melestarikan lingkungan alam di daerah tertentu. Pada zaman kerajaan memang raja memiliki kearifan, antara lain kearifan untuk memelihara kelestarian lingkungan alam. Hal itu sesuai dengan konsep raja, yaitu sebagai penguasa bumi dan isinya di wilayah kekuasaannya. Namun kearifan itu tidak dinyatakan secara tersurat (jelas), melainkan secara tersirat, seperti kearifan dari tujuan dan makna *kabuyutan*.

b. Pengertian dan Pemaknaan Kabuyutan

Secara etimologis, istilah *kabuyutan* berasal dari kata dasar “*buyut*”, mendapat awalan “*ka*” dan akhir “*an*”. Awalan dan akhiran itu menunjukkan tempat. Berarti

secara etimologis, *kabuyutan* adalah tempat *buyut*. Dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Sunda, istilah *buyut* mengandung tiga arti. Pertama, anak dari cucu (keturunan keempat → garis silsilah ke bawah, atau orang tua (ibu dan bapak) dari nenek dan kakek → garis silsilah ke atas. Bila *buyut* dalam pengertian kedua (garis silsilah ke atas) dihubungkan dengan sebutan *kabuyutan*, maka *buyut* yang dimaksud adalah leluhur yang pertama kali tinggal di tempat yang kemudian disebut *kabuyutan*.

Sudah diungkapkan bahwa di daerah Jawa Barat, *kabuyutan* mulai dikenal sejak zaman Kerajaan Sunda (670 – 1579/80 M.). Menurut beberapa sumber sejarah Jawa Barat, Kerajaan Sunda memiliki wilayah sangat luas, termasuk Dataran Tinggi Bandung yang mencakup daerah yang kemudian bernama Cipageran. Berarti Cipageran mulai menjadi *kabuyutan* pada zaman kerajaan tersebut, beberapa waktu kemudian setelah sebagian daerah Sungai Sanghyang Tapak ditetapkan oleh Raja Sunda sebagai *kabuyutan*. Cipageran menjadi *kabuyutan* karena tempat/daerah itu memiliki potensi yang harus dijaga/dipelihara untuk kemaslahatan penduduk daerah setempat.

Dengan mengacu pada sebutan *buyut* dalam garis silsilah, boleh jadi Cipageran disebut *kabuyutan* oleh generasi keempat, yaitu *buyut* dari penduduk pertama Cipageran. Berarti istilah *kabuyutan* yang mengacu pada silsilah, memiliki fungsi sebagai kata sifat yang menunjukkan pertalian atau hubungan antargenerasi. Istilah *kabuyutan* yang mengacu pada tempat, memiliki fungsi sebagai kata benda, yaitu tempat yang disakralkan. Tempat dan benda-benda di dalamnya merupakan warisan dari *buyut* (leluhur), disertai amanat leluhur yang tabu untuk dilanggar (Kusmayadi, "<http://cipakudarmaja.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-kabuyutan.html>). Artinya, sejalan dengan temuan peninggalan sejarah beberapa prasasti dan naskah kuno di Tatar Sunda dan sekitarnya yang sudah

diungkapkan sebelumnya, seperti Prasasti Cibadak, Prasasti Ciburuy, Amanat Galunggung dan lain-lain. Oleh karena itu, Yayasan Kabuyutan Sri Sunda (2011: 24), memaknai Kabuyutan sebagai sebuah tempat yang bukan hanya disakralkan dari pemaknaan 'asli'nya tetapi juga pengembangan pemaknaan dalam rangka revitalisasi (nilai-nilai) kebudayaan. Dalam kaitan konteks demikian, maka terdapat tingkatan-tingkatan makna sebagai tempat yang suci atau tempat yang disakralkan beserta segala kandungan isinya, baik yang tampak (*tangible*) maupun tak tampak (*inatable*) (Kurniawan, "<http://www.Bedanews.com/kabuyutan-solusi-kemajuan-bangsa-yang-se-makin-terancam>). Tingkatan-tingkatan pemaknaan tersebut dirumuskan dari berbagai sumber dan teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Umumnya dikaitkan dengan makna utamanya sebagai tempat suci, tempat yang disucikan atau disakralkan, situs atau tempat keramat, situs atau prasasti, di (menurut) masyarakat Tatar Sunda.
- b. Nama tempat suci di kawasan luar Tatar Sunda, namun orang yang menggunakannya adalah orang Sunda (lihat misalnya: penggunaan istilah "kabuyutan Majapahit" oleh Bujangga Manik, seorang sejarawan Sunda yang hidup kurang lebih pada abad 15-16 M).
- c. Tempat-tempat suci yang dinamakan kabuyutan tersebut dapat berupa pertapaan, gunung, sungai, atau kawasan kerajaan, yang secara geografis dapat dijumpai sampai di luar wilayah Jawa Barat sekalipun.

Melalui pengertian dan pemaknaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu "ngamumule" kabuyutan sebagai tempat yang disakralkan/disucikan, agar jati diri orang Sunda tetap eksis/lestari. Pewarisan nilai pun akan tetap berlangsung karena kabuyutan akan tetap mencirikan kosmologi masyarakat Sunda dulu (zaman kerajaan), sebagai tempat pendidikan moral dan spiritual yang alami (menyatu dengan alam)

sehingga akan terjadi proses pewarisan nilai yang terjaga *sustainability*-nya. Boleh jadi, melestarikan kabuyutan menjadi salah satu upaya dalam pewarisan nilai yang *never ending*. Untuk itulah penulis memandang perlunya beberapa tulisan dalam perspektif akademis dilakukan, sehingga interpretasi atas peristiwa masa lalu mendapat dukungan berupa bukti sejarah yang secara argumentatif dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, bukan hanya sekadar untuk kebanggaan atas masa lalunya, keberadaan *kabuyutan* diharapkan dapat tetap menjadi ‘benteng yang kokoh’ bagi masyarakat Jawa Barat pada khususnya - bangsa Indonesia pada umumnya, dalam upaya mempertahankan jati diri bangsa melalui kearifan lokal di tengah arus global yang semakin kuat.

3. Sumber Sejarah/Manuskrip yang Menyebut Istilah Kabuyutan Setelah Prasasti Cibadak

a. Naskah Ciburuy atau Naskah Galunggung yang terkenal sebagai “Amanat Galunggung” atau “Amanat Prabuguru Darmasiksa” yang berasal dari Abad ke-13 juga menyebut istilah *kabuyutan*. Naskah tersebut ditemukan di daerah Ciburuy, Garut Selatan, dan disebut pula sebagai Kropak No. 632 dalam arsip Museum Nasional. Naskah ini ditulis pada daun nipah sebanyak 6 (enam) lembar yang terdiri atas 12 (dua belas) halaman; menggunakan aksara Sunda Kuno (Suryalaga, 2002). “Amanat Galunggung” adalah peninggalan Raja Sunda Prabuguru Darmasiksa (1175 - 1297 M), yaitu nasihat-nasihat beliau kepada anak keturunannya dan semua rakyatnya. Amanat ini berupa *cecekelan hirup* (pegangan hidup), *ulah* (larangan), dan *kudu* (keharusan) yang harus dipegang teguh oleh semua orang Sunda agar jaya sebagai bangsa. Melalui naskah kuno ini pun diketahui bahwa masyarakat Sunda sudah memiliki pemimpin yang berpikiran futuristik

dalam upaya mencapai kejayaan bangsa. Pemikiran-pemikiran tersebut datangnya dari sebuah tempat yang sampai saat ini dikenal sebagai *kabuyutan*.

b. Prasasti Kebantenan (PKb) V, yaitu prasasti nomer 5 peninggalan Sribaduga (Prabu Siliwangi), Raja Pajajaran yang pertama dan termashur pada sekitar abad 14 M. Penggunaan istilah *kabuyutan* dapat ditelusuri lebih lanjut dalam sejarah, tidak saja di kalangan masyarakat Sunda, namun ternyata dijumpai pula dalam sejarah peradaban suku bangsa selain Sunda (Yayasan Kabuyutan Sri Sunda, 2011: 23-24). Dengan demikian diketahui bahwa istilah *kabuyutan* yang muncul secara tertulis pada abad ke-11 pada saat Tatar Sunda diperintah Sri Jayabhupati, Raja Sunda ke-11 (1030-1042 M.), menjadi istilah yang kemudian digunakan oleh para penguasa Tatar Sunda berikutnya dan melalui peristiwa sejarah itulah, istilah dan pemaknaan *kabuyutan* sampai kepada generasi kita sekarang ini.¹ Untuk itu, berikutnya penting kiranya dibahas tentang pengertian dan pemaknaan kabuyutan agar diperoleh kesamaan persepsi untuk menghasilkan sebuah diskusi yang lebih lanjut terkait fungsi dan kedudukan kabuyutan dalam Masyarakat Sunda tempo dulu sampai dewasa ini yang akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

¹ Walau secara tertulis istilah Kabuyutan baru muncul pada abad ke-11 M, tetapi dimungkinkan cikal bakalnya berasal dari Kerajaan Hindu-Budha yang pernah eksis di daerah Jawa Barat yakni Kerajaan Tarumanagara (abad ke-4 hingga pertengahan abad ke-7). Kerajaan ini diteruskan oleh Kerajaan Galuh (awal abad ke-7 hingga akhir abad ke-16), dan Kerajaan Sunda/Pajajaran (akhir abad ke-7 hingga akhir abad ke-16) - yang menjaga dan melestarikan keberadaan kabuyutan sehingga sampai pada generasi kita saat ini.

4. Kabuyutan Dulu dan Kini

Dalam kondisi sekarang, Kabuyutan Cipageran termasuk ke dalam wilayah administratif Pemkot (Pemerintah Kota) Cimahi, tepatnya bagian dari wilayah Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Berarti sampai sekarang perjalanan sejarah Kabuyutan Cipageran melalui tiga zaman, yaitu zaman kerajaan, zaman penjajahan, dan zaman kemerdekaan. Dengan kata lain, eksistensi Kabuyutan Cipageran berlangsung pada zaman dulu hingga zaman sekarang. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan secara kronologis perkembangan kabuyutan di Tatar Sunda, termasuk Kabuyutan Cipageran Cimahi di dalamnya dari awal kemunculan sampai dewasa ini.

a. Zaman Kerajaan

Pada zaman kerajaan, di Tatar Sunda/Jawa Barat selain terdapat beberapa buah kabuyutan, antara lain Kabuyutan Ciburuy, Kabuyutan Galunggung, Kabuyutan Linggawangi, juga terdapat Kabuyutan Cipageran. Informasi ini bisa diketahui melalui prasasti dan naskah kuno seperti yang sudah disampaikan sebelumnya.

Cipageran ditetapkan menjadi salah satu *kabuyutan* oleh Sri Jayabhupati (nama lengkapnya Sri Jayabhupati Jayamanahen Wisnumurti Samarawijaya Sakalabuanamandaleswaranindita Harogowardana Wikramo-tunggadewa), Raja Sunda ke-19 (1030-1042 M.), pada bagian awal pemerintahannya. Alasan atau pertimbangan raja menetapkan Cipageran menjadi *kabuyutan* terutama karena daerah itu memiliki potensi alam yang harus dijaga dan dipelihara, untuk kemaslahatan penduduknya.

Waktu itu, potensi alam daerah Cipageran yang harus dipelihara antara lain, sumber air, rumpun bambu, dan lahan yang subur. Sumber air harus dijaga/dipelihara karena merupakan potensi penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan makhluk, terutama kehidupan manusia, dan untuk kesuburan tanah.

Rumpun bambu harus dipelihara, karena pohon bambu memiliki daya serap tinggi terhadap air hujan, sehingga air hujan tidak menimbulkan banjir, dan kehidupan masyarakat Sunda tempo dulu tidak terpisahkan dari bambu. Bambu merupakan salah satu bahan penting dalam kehidupan masyarakat Sunda kuno.

Sehubungan dengan hal tersebut, Raja Sunda juga membuat kebijaksanaan. Penduduk daerah setempat dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Berarti kedudukan *Kabuyutan* Cipageran identik dengan desa perdikan. Pada zaman kerajaan, desa perdikan merupakan daerah istimewa, antara lain karena penduduknya bebas dari kewajiban membayar pajak (Hardjasaputra dan Yulifar, 2017: 2-6).

Alasan atau pertimbangan raja membebaskan penduduk *kabuyutan* dari kewajiban membayar pajak menyangkut dua hal. Pertama, penduduk daerah itu berkewajiban memelihara lingkungannya. Kedua, penduduk itu mematuhi perintah raja, dan memelihara ajaran leluhur.

Raja menetapkan suatu daerah menjadi *kabuyutan*, dilakukan dalam upacara khusus. Hal ini diberitakan dalam sumber berupa naskah, antara lain *Naskah Ciburuy* yang lebih dikenal dengan sebutan "*Amanat Galunggung*" (Kropak 632 di Perpustakaan Nasional). Dalam naskah itu, raja mengingatkan atau berpesan agar *kabuyutan* jangan sampai jatuh kepada/dikuasai oleh orang non-Sunda. Orang yang memelihara *kabuyutan* akan memperoleh "kesaktian", unggul dalam perang, hidup akan lama, keturunannya akan bahagia. Amanat raja itu menyiratkan bahwa kedudukan *kabuyutan* mengandung arti penting.

Berarti penetapan Cipageran menjadi *kabuyutan* (sebagai daerah sakral) merupakan salah satu kearifan Raja Sunda untuk melestarikan daerah yang bersangkutan. Kearifan Raja Sunda itu mungkin pula mengandung tujuan politis, yakni agar daerah Cipageran yang berada di sebelah timur Sungai Citarum, jauh dari pusat Kerajaan Sunda (daerah pusat Kota

Bogor sekarang), tetap menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Sunda. Melalui perundingan, Raja Sunda dan Raja Galuh menetapkan Sungai Citarum menjadi batas wilayah kedua kerajaan itu. Daerah sebelah barat Sungai Citarum menjadi wilayah Kerajaan Sunda, dan daerah di sebelah timurnya menjadi wilayah Kerajaan Galuh. Jika dugaan itu benar, berarti Raja Sunda menetapkan Cipageran sebagai *kabuyutan* merupakan salah satu upaya Raja Sunda untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya.

Pada zaman kerajaan, sabda raja dianggap oleh masyarakat sebagai hukum yang pantang dilanggar. Jika semula daerah itu bukan bernama Cipageran, mungkin atas dasar hal tersebut itulah tempat/*kabuyutan* itu kemudian diberi nama Cipageran. Seolah-olah potensi daerah itu yang harus dijaga dan dipelihara dan "*dipager*" ("dipagar") oleh aturan-aturan atau hukum raja, dan amanat leluhur (*buyut*). Amanat itu substansinya (intinya) adalah mengingatkan generasi penerus untuk selalu memelihara lingkungannya. Amanat tersebut, oleh komunitas *kabuyutan* modern dituliskan kembali dalam bentuk semacam replika prasasti di kawasan Kabuyutan Cipageran, tepatnya di depan Balai *Pasamon* (tempat pertemuan).

Selain itu, Kabuyutan diduga sebagai tempat pendidikan khususnya pendidikan keagamaan. Dalam budaya Hindu, tempat dengan fungsi demikian itu disebut "mandala".

Waktu itu *mandala* merupakan daerah yang disakralkan. Di tempat itu kaum brahmana atau begawan bertugas memelihara ajaran agama. Di tempat itu pula para pujangga menulis kitab-kitab, terutama tentang agama. Dengan demikian, pada zaman kerajaan, *kabuyutan* memiliki fungsi yang mengandung kekuatan magis dan nilai/makna penting. Dalam pandangan masyarakat Sunda Kuno, kedudukan dan fungsi *kabuyutan* setara dengan "nilai kemenangan dalam perang". Mungkin "perang" yang dimaksud bukan perang secara fisik, tetapi "perang"

melawan hawa nafsu, "perang" melawan ketidakadilan demi menegakkan kebenaran, dan lain-lain.

Kerajaan Sunda yang membawahi Kabuyutan Cipageran, eksistensinya berakhir pada tahun 1579/1580, akibat Islamisasi dari Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf. Setelah Kerajaan Sunda runtuh dan sebelum berlangsungnya zaman penjajahan, Kabuyutan Cipageran berkedudukan sebagai daerah merdeka. Sampai dengan paruh kedua abad ke-17 *kabuyutan* itu seolah-olah merupakan "daerah tak bertuan". (Hardjasaputra dan Yulifar, 2017: 7)

b. Zaman Penjajahan

Zaman Kompeni (1677-1799)

Tatar Sunda/Jawa Barat mengalami zaman penjajahan dari dua bangsa, yaitu Belanda dan Jepang. Tatar Sunda, khususnya daerah Priangan, mulai berada pada zaman penjajahan Belanda diawali oleh kekuasaan Kompeni, aparat bersenjata dari perusahaan dagang Belanda di Hindia Timur, yaitu VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*), yang berdiri tahun 1602.

Kompeni menguasai daerah Priangan mulai bagian akhir tahun 1677, ketika daerah Priangan berada di bawah hegemoni Kerajaan Mataram mulai akhir abad ke-16, pada waktu Kerajaan Mataram dirajai oleh Sutawijaya alias Panembahan Senopati (1586-1601). Daerah pertama di Priangan yang dikuasai oleh Mataram adalah Kerajaan Galuh (1595). Daerah Priangan dikuasai oleh Mataram terutama ketika kerajaan itu diperintah oleh Sultan Agung (1613-1645) dan Sunan Tegalwangi yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Amangkurat I (1645-1677), pengganti Sultan Agung. Di daerah Priangan, Sultan Agung mengubah Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sumedang Larang masing-masing menjadi kabupaten, dan membentuk Kabupaten Sukapura (1632), Kabupaten Bandung dan Kabupaten Parakanmuncang (1633). Setelah

Kabupaten Bandung berdiri, Kabuyutan Cipageran masuk ke dalam wilayah kabupaten tersebut.

Priangan kemudian jatuh ke bawah kekuasaan Kompeni, akibat persekongkolan Sunan Amangkurat I dengan Kompeni. Sekitar tahun 1677, pusat Kerajaan Mataram (Kota Gede Yogyakarta sekarang) diserang oleh pasukan Madura dipimpin oleh Pangeran Trunojoyo. Pangeran Trunojoyo menyerang Mataram sebagai balas dendam atas kematian ayahnya oleh tindakan Sunan Amangkurat I. Untuk mengatasi serangan itu, Sunan Amangkurat I meminta bantuan Kompeni yang berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta). Terjadilah dua kali perjanjian antara Sunan Amangkurat I dengan Kompeni. Perjanjian pertama terjadi tanggal 19-20 Oktober 1677. Melalui perjanjian pertama ini, Kompeni memperoleh wilayah Priangan bagian barat dan tengah (Cianjur, Bandung, dan Sumedang). Berarti Cipageran yang termasuk wilayah Cimahi Kabupaten Bandung waktu itu berada di bawah kekuasaan Kompeni.

Perjanjian kedua antara Sunan Amangkurat I dengan Kompeni terjadi pada tanggal 5 Oktober 1705. Akibat perjanjian kedua, Kompeni menguasai daerah Priangan bagian timur (Limangan, Sukapura, dan Galuh) serta Cirebon (Hardjasaputra dan Yulifar, 2017: 10-12).

Di bawah kekuasaan Kompeni, kedudukan Kabuyutan Cipageran pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Hal itu disebabkan Kompeni tidak mengganggu kehidupan masyarakat adat. Tindakan Kompeni terhadap masyarakat pribumi lebih ditujukan kepada pejabat dalam pemerintahan pribumi, khususnya bupati. Para bupati di Priangan harus mengakui kekuasaan Kompeni dan menjalankan kewajibannya untuk Kompeni.

Sampai waktu itu, masyarakat Kabuyutan Cipageran paling tidak merupakan generasi ke-12. Maka waktu itu

Kabuyutan Cipageran tidak lagi dipimpin oleh tokoh bergelar resi, melainkan oleh tokoh yang dipercayai oleh warga masyarakat daerah itu sebagai ketua adat. Berarti masyarakat Kabuyutan Cipageran tetap berkedudukan sebagai masyarakat adat.

Kabuyutan Cipageran memiliki kedudukan dan fungsi penting bagi Kompeni, terkait dengan pelaksanaan politik ekonomi Kompeni di daerah Priangan. Di daerah Priangan, Kompeni memberlakukan penanaman wajib kepada penduduk pribumi, khususnya para petani, dalam sistem yang disebut *Preangerstelsel* (Aturan Priangan). Tanaman utama yang wajib ditanam dan dipelihara oleh para petani adalah kopi. Daerah yang menjadi tempat penanaman kopi adalah daerah pedalaman. Oleh karena itu Cipageran pun termasuk daerah penanaman kopi. Berarti di bawah kekuasaan Kompeni, dari segi budaya, Cipageran tetap berkedudukan sebagai *kabuyutan*. Namun dari segi ekonomi, waktu itu daerah *kabuyutan* tersebut difungsikan oleh Kompeni sebagai salah satu tempat implementasi eksploitasi ekonomi Kompeni untuk kepentingan VOC, khususnya menyangkut potensi kopi².

Kekuasaan Kompeni di Nusantara berakhir pada penghujung tahun 1799. Selanjutnya kekuasaan di Nusantara diambilalih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Di Nusantara berlangsung pemerintahan Hindia Belanda mulai awal Januari 1808, dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur Jenderal pertama Hindia Belanda adalah Herman Willem Daendels (1808-1811) (Yulifar, 2014: 17).

² Dalam kondisi sekarang pun, sebagian lahan di Kabuyutan Cipageran digunakan oleh masyarakat setempat sebagai daerah penanaman kopi.

c. Zaman Hindia Belanda (awal 1808-awal 1942) dan Pendudukan Jepang (1942-1945)

Berlangsungnya pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara menyebabkan terjadinya perubahan, terutama dalam bidang pemerintahan (Yulifar, 2014: 17). Pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal H.W. Daendels, Kabuyutan Cipageran tetap merupakan daerah dalam lingkungan Kabupaten Bandung. Konkretnya *kabuyutan* itu menjadi bagian dari wilayah Kacutakan (Distrik) Cilokotot. Tiap *kacutakan* membawahi beberapa desa dan kampung. Boleh jadi waktu itu dalam bidang pemerintahan pribumi, Cipageran berkedudukan sebagai desa atau kampung. Namun dalam bidang budaya/adat, kedudukannya tetap sebagai *kabuyutan*. Hal itu disebabkan, pemerintah Hindia Belanda sama halnya dengan Kompeni, tidak mengganggu kehidupan masyarakat adat.

Di daerah Priangan, Pemerintah Hindia Belanda meneruskan pelaksanaan penanaman wajib dalam *Preangerstelsel* warisan Kompeni. Berarti pemerintah Hindia Belanda pun memfungsikan daerah Kabuyutan Cipageran sebagai salah satu daerah perkebunan kopi. Hal itu terus berlangsung sampai awal abad ke-20.

Ketika pemerintahan Hindia Belanda dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816) mewakili pemerintah Kerajaan Inggris, terjadi perubahan dalam bidang pemerintahan. Di daerah Priangan, Kabupaten Bandung dibagi menjadi dua *afdeling*³, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Distrik Cilokotot yang membawahi Cipageran menjadi bagian dari Afdeling Bandung Utara. Waktu itu Cimahi menjadi ibukota Distrik Cilokotot. Namun diduga Cipageran tetap berkedudukan sebagai *kabuyutan*.

Cipageran berkedudukan sebagai *kabuyutan* terus berlangsung sampai akhir

pemerintahan Hindia Belanda. Secara politis hal itu disebabkan pemerintah Hindia Belanda gagal melaksanakan pemerintahan langsung, yaitu memerintah rakyat pribumi tanpa perantara pejabat pribumi, khususnya bupati.

Pada zaman pendudukan Jepang pun mungkin Kabuyutan Cipageran tetap eksis, karena pada prinsipnya pemerintah pendudukan Jepang juga tidak mengganggu kehidupan masyarakat adat. Boleh jadi pemerintah pendudukan Jepang tidak menaruh perhatian terhadap masyarakat adat. Pemerintah pendudukan Jepang hanya menghilangkan pengaruh kolonial Belanda di kalangan masyarakat pribumi, antara lain menghapuskan jabatan gubernur jenderal dan mengganti sebutan-sebutan dalam pemerintahan daerah dengan istilah Jepang. Perhatian pemerintah pendudukan Jepang lebih tertuju pada potensi tertentu yang penting artinya bagi perang Jepang melawan pihak Sekutu. Oleh karena itu, masyarakat adat di Tatar Sunda/Jawa Barat, dari generasi ke generasi penerusnya, tetap eksis sampai sekarang.

d. Zaman Pasca Kemerdekaan Hingga Saat ini

Sudah diketahui secara umum bahwa kemerdekaan Indonesia berawal dari pencetusan Poklamsi Kemerekaan tanggal 17 Agustus 1945, yang melahirkan pemerintahan RI (Republik Indonesia). Sampai sekarang pemerintahan RI berlangsung silih berganti, dari Orde Lama (1945-1966) ke Orde Baru (1967-1998), kemudian beralih ke Orde Reformasi (1998-sekarang).

Meskipun pemerintahan RI berganti-ganti orde, namun masyarakat adat dan daerahnya tetap eksis, termasuk Kabuyutan Cipageran. Dengan kata lain, pada zaman kemerdekaan (sampai sekarang), Cipageran tetap berkedudukan sebagai kabuyutan. Akan tetapi kedudukan dan fungsi kabuyutan itu terkesan tidak/kurang mendapat perhatian dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah

³ *Afdeling* adalah wilayah administratif setingkat lebih rendah dari kabupaten.

pusat. Padahal bila ditelaah secara saksama, kedudukan dan fungsi Kabuyutan Cipageran dan *kabuyutan-kabuyutan* lainnya, pada zaman sekarang pun memiliki arti penting bagi pemerintah dalam mengimplementasikan program-programnya, terutama program yang terkait dengan budaya dan pelestarian lingkungan. Hal itu disebabkan budaya *kabuyutan* syarat dengan hal-hal yang layak menjadi pembelajaran.

- a) Budaya *kabuyutan* mengandung kearifan-kearifan. Hal itu tercermin dari amanat *buyut* yang telah disebutkan. Jika dicermati, di antara kearifan-kearifan itu ada kearifan yang masih dapat diaplikasikan dalam kehidupan masa kini dan kehidupan di masa mendatang. Misal, kearifan tentang pemeliharaan lingkungan, dan kearifan mengenai bertani. Sampai sekarang tidak pernah terjadi masyarakat adat menderita kelaparan akibat kekurangan bahan pangan.
- b) Kearifan-kearifan yang terkandung dalam budaya *kabuyutan*, layak dipahami sehingga menjadi bahan pembelajaran dalam kehidupan masa kini dan untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang. Hal itu disebabkan kehidupan masa kini adalah kesinambungan dari kehidupan masa dulu, dan kehidupan di masa mendatang adalah kesinambungan dari kehidupan masa kini. Dalam hal ini leluhur orang Sunda menyatakan dalam bahasa Sunda kuno: "*Hana nguni hana mangké, tan hana nguni tan hana mangké*" ("Ada dulu maka ada sekarang, tanpa ada dulu tidak akan ada sekarang").
- c) *Kabuyutan* merupakan "museum" yang memelihara budaya tradisional masyarakat. Hal itu mengandung arti, masyarakat Kabuyutan Cipageran dan masyarakat *kabuyutan* lainnya, senantiasa memelihara budaya tradisional sebagai bagian dari jati dirinya. Dalam hal ini perlu dikemukakan, bahwa di Kabuyutan

Cipageran sering dipentaskan kesenian tradisional Sunda. Sekarang, budaya masyarakat Sunda di luar kabuyutan, makin cenderung tergeser oleh budaya modern yang bernuansa budaya Barat. Salah satu makna dari kesenian tersebut adalah kesatuan dan persatuan (kekompakan). Sekarang, kesatuan dan persatuan di kalangan masyarakat umumnya terkesan makin luntur. Hal-hal tersebut merupakan bagian integral dari eksistensi Kabuyutan Cipageran zaman sekarang.

Berdasarkan amanat *buyut* itu, memelihara sumber air menjadi budaya di kalangan masyarakat Kabuyutan Cipageran. Dalam waktu tertentu, air dari berbagai sumber air diambil kemudian dikumpulkan dalam suatu upacara yang disebut upacara "*kawin cai*". Upacara itu dipimpin oleh *pupuhu* (ketua) kabuyutan. Boleh jadi dalam upacara itu dibacakan doa/mantra untuk kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat daerah setempat. *Awi* menjadi tumbuhan yang mendapat perhatian warga kabuyutan, karena *awi* merupakan bahan penting dalam kehidupan masyarakat Sunda sejak dulu, bahkan *awi* merupakan bahan utama pembuatan keraton zaman kerajaan. Oleh karena itu, keraton peninggalan kerajaan di Tatar Sunda sulit ditemukan reruntuhannya. Berarti di Kabuyutan Cipageran terdapat tiga unsur yang mewarnai budaya *kabuyutan*, yaitu *cai*, *awi*, dan *silat*. Bahwa *silat/penca* sudah muncul pada zaman kerajaan, antara lain disebutkan dalam naskah *Kidung Sunda* (Kidoeng Soenda, 1878), antara lain sebagai berikut:

*Puluh-puluh rombongan henteu kaitung
tujuh rupa penca
nu ulin pakarang bae
lain deui bangsa serimpi budaya*

(Berpuluh-puluh rombongan tak terhitung tujuh macam penca lainnya jenis serimpi budaya).

5. Kabuyutan Cipageran dan Permasalahannya

a. Eksistensi Kabuyutan Cipageran

Suatu tempat menjadi *kabuyutan* terkait pula dengan sejumlah orang yang bermukim di tempat itu atau di sekitar tempat dimaksud, karena larangan atau pantang di *kabuyutan* ditujukan kepada orang. Demikian pula halnya dengan Cipageran sebagai *kabuyutan*.

Pada suatu pemukiman tentu ada orang yang berkedudukan dan berperan sebagai pemimpin. Boleh jadi kepemimpinan di Kabuyutan Cipageran prinsipnya mengacu pada sistem kepemimpinan di kerajaan, yaitu bersifat turun-temurun. Berarti ketua Kabuyutan Cipageran dan warganya yang pertama kali menghuni Cipageran adalah leluhur (*buyut*) dari warga Cipageran generasi penerusnya. Namun belum terungkap bagaimana kehidupan di *kabuyutan* itu setelah zaman kerajaan berakhir, masih gelap. Generasi penerus warga *kabuyutan* itu "*pareumeun obor*" (kehilangan jejak) mengenai leluhur mereka. Kondisi itu berlangsung dalam waktu cukup lama, mencakup zaman penjajahan.

Kerajaan Sunda runtuh tahun 1579/1580 akibat Islamisasi yang dilancarkan dari Kesultanan Banten ke daerah pedalaman Jawa Barat. Gerakan islamisasi itu dipimpin oleh Sultan Banten Maulana Yusuf. Namun diduga Kabuyutan Cipageran tetap eksis dengan kedudukan seperti zaman kerajaan, karena pemeliharaan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam, dan tradisi/budaya Sunda atau pandangan hidup orang Sunda dulu pada prinsipnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini memunculkan ungkapan, "Sunda itu Islam dan Islam itu Sunda".

Eksplorasi ekonomi itu melalui penanaman wajib dalam sistem yang disebut *Preangerstelsel* (Sistem Priangan), yang dimulai pada tahun 1677 M. Tanaman utama yang wajib ditanam dan dipelihara oleh petani adalah kopi. Penanaman wajib itu dilakukan di daerah

pedalaman/perbukitan di luar lahan pertanian. Dalam pandangan penduduk pribumi, daerah/tempat yang menjadi *kabuyutan*, tetap sebagai *kabuyutan*. Apalagi pihak kolonial tidak mengganggu tradisi masyarakat pribumi, bahkan kedudukan penguasa pribumi pun tidak diganggu, asalkan ia/mereka mengakui kekuasaan Kompeni. Kondisi demikian boleh jadi terjadi pula di Cipageran. Pada zaman kekuasaan Kompeni, *kabuyutan* berada di wilayah *kacutakan* (wilayah administratif setingkat distrik).

Beralihnya kekuasaan Belanda di Nusantara, dari Kompeni ke Pemerintah Hindia Belanda mulai awal abad ke-19, kiranya tidak berdampak pada perubahan kedudukan *kabuyutan* secara prinsip. Perubahan yang menyangkut *kabuyutan* hanya perubahan kedudukan *kabuyutan* dalam pembagian wilayah administratif. Kondisi demikian itu diduga berlangsung pula pada zaman pendudukan Jepang, karena pemerintah militer Jepang pun pada dasarnya tidak mengganggu kehidupan dan budaya masyarakat adat.

Sekarang kedudukan dan fungsi *kabuyutan* seperti zaman dulu termasuk Kabuyutan Cipageran, cenderung pudar tergerus oleh situasi dan kondisi zaman. Hal yang penting dari *kabuyutan* zaman sekarang adalah maknanya, tetapi itu pun bila makna *kabuyutan* itu dipahami secara baik dan benar. *Kabuyutan* pada zaman sekarang, bila dipahami dengan baik dan benar memiliki makna sebagai berikut.

a) Bagi Kehidupan Sosial Budaya

Makna *kabuyutan* bagi kehidupan sosial budaya tercermin dari amanat *buyut* (leluhur) yang berisi pedoman dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, amanat tersebut seyogyanya dipahami dan dilaksanakan, bukan hanya oleh warga *kabuyutan*, tetapi juga oleh warga masyarakat umum. Dengan demikian, maka kehidupan sosial akan berlangsung dengan baik, dan budaya pun akan terpelihara.

Pemahaman akan makna *kabuyutan*, yakni pentingnya pemeliharaan lingkungan, sangat berguna bagi ekonomi kerakyatan. Pelestarian lingkungan alam erat kaitannya dengan kehidupan ekonomi, khususnya ekonomi pertanian, dan keamanan lingkungan.

Pantang terkait dengan *kabuyutan*, bila dipahami secara baik, juga mengandung makna edukatif, yakni untuk mengingatkan pada manusia, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hal itu merupakan pengetahuan, dan pengetahuan adalah salah satu unsur budaya/kebudayaan.

b) Bagi Ilmu Pengetahuan

Suatu ilmu berasal dari pengetahuan tentang sesuatu. Seperti telah disinggung pada uraian tentang asal-usul *kabuyutan*, penetapan tempat menjadi *kabuyutan* mengandung kearifan, antara lain kearifan untuk melestarikan lingkungan. Kearifan itu terkait dengan kepemimpinan. Bila dipahami dengan baik, kearifan itu tidak hanya berlaku pada awal eksistensi *kabuyutan*, tetapi berlaku untuk selamanya.

Bila hal tersebut ditelaah secara saksama, kepemimpinan yang dilandasi oleh kearifan, berarti dari pengetahuan dapat menjadi ilmu pengetahuan. Konkretnya antara lain muncul konsep dan teori kepemimpinan. Terkait dengan *kabuyutan*, kepemimpinan di *kabuyutan* mengarah pada kepemimpinan kharismatis.

Arti penting memahami *kabuyutan* secara umum adalah meningkatkan kesadaran sejarah. Munculnya *kabuyutan* merupakan bagian dari sejarah daerah yang bersangkutan. Tempat yang menjadi *kabuyutan*, tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi memiliki asal-usul atau latar belakang. Hal itu sesuai dengan salah satu kaidah ilmu sejarah, bahwa suatu peristiwa tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi memiliki latar belakang.

Kearifan yang terkandung dalam *kabuyutan* memiliki makna edukatif. Fungsi mendasar dari sejarah pun adalah fungsi edukatif. Dengan demikian,

memahami *kabuyutan*, memiliki makna penting untuk menambah pengetahuan sejarah, khususnya sejarah daerah yang bersangkutan. Pengungkapan makna *kabuyutan* juga penting artinya untuk memiliki pengetahuan teknologi lokal, antara lain mengenai arsitektur tradisional yang diterapkan pada bangunan di *kabuyutan*.

c) Bagi Program Pemerintah

Salah satu program pemerintah sekarang pun adalah pelestarian lingkungan, termasuk pelestarian tempat-tempat bernilai sejarah yang disebut situs sejarah. Hal yang disebut terakhir bahkan sudah memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Cagar Budaya. Berarti *kabuyutan* sebagai tempat harus diperhatikan dan dilindungi oleh pemerintah, karena *kabuyutan* identik dengan situs sejarah.

Dalam mengimplementasikan program pelestarian lingkungan, cukup beralasan bila kearifan-kearifan yang terkandung dalam *kabuyutan*, seperti, pemeliharaan hutan, pemeliharaan sumber air, kearifan dalam pertanian, dan lain-lain, menjadi acuan. Terkait dengan pemeliharaan hutan dan sumber air, leluhur Sunda sudah mengingatkan, bahwa "*leuweung ruksak, cai beak, rakyat balangsak*" (hutan rusak, air habis, rakyat menderita).

D. PENUTUP

Dari uraian di atas terkait awal mula kemunculan dan perkembangan Kabuyutan Cipageran Cimahi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kabuyutan Cipageran diduga kuat mulai ada sejak zaman Kerajaan Sunda yang eksis antara akhir abad ke-7 sampai dengan akhir abad ke-16. Berarti Kabuyutan Cipageran memiliki perjalanan sejarah sangat panjang.
2. Kabuyutan Cipageran dapat eksis pada setiap zaman yang dilaluinya, berkat perhatian dan sikap warganya, serta perjalanan sejarah *kabuyutan* yang

- panjang, paling tidak meliputi lima Zaman.
3. Mengacu pada perjalanan sejarahnya, Kabuyutan Cipageran merupakan salah satu bukti adanya tempat leluhur Sunda, dan replika Kampung Sunda tempo dulu.
 4. Kabuyutan Cipageran khususnya dan *kabuyutan* di Tatar Sunda umumnya, secara tersirat menunjukkan kepribadian masyarakat Sunda dalam dimensi ruang, bentuk, dan waktu. Kepribadian itu terbentuk dari endapan pengalaman para leluhur dan pengalaman pribadi generasi penerusnya.
 5. Amanat atau pesan leluhur Sunda yang sangat dihormati oleh generasi penerusnya, menunjukkan nilai-nilai tinggi dan strategis dari kebudayaan, khususnya kebudayaan Sunda.
 6. Makna *kabuyutan* memiliki arti penting, baik untuk menambah ilmu pengetahuan (kegunaan teoretis) maupun untuk kepentingan program pemerintah mengenai pelestarian lingkungan (kegunaan praktis).

Meskipun uraian dalam tulisan ini masih bersifat garis besar dan belum terfokus pada substansi masalahnya, namun mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi warga Kabuyutan Cipageran dan pihak-pihak terkait. Terutama untuk kepentingan para *stakeholder* dalam upaya ke arah pelestarian budaya atau untuk dikembangkan menjadi kawasan yang memiliki nilai ekonomis, misalnya dikembangkan menjadi daerah wisata yang sekaligus menjadi cagar budaya seperti yang diamanahkan UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya atau UU No. 10/2009 tentang kepariwisataan. Diharapkan dari kawasan tersebut akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru pada kawasan tersebut. Dengan kata lain, kita bisa berpegang pada pepatah yang menyatakan: “Tiada rotan, akar pun berguna”

Berdasar kepada simpulan tersebut maka berikut ini adalah saran dari penulis: serangkaian data dan fakta yang menjadi informasi yang secara faktual dan aktual terkait perjalanan panjang Kabuyutan Cipageran Cimahi menunjukkan bahwa pentingnya makna, peran dan kedudukan sebuah *kabuyutan* dalam masyarakat kekinian. Namun demikian, kedudukan dan makna *kabuyutan* itu dalam perjalanan sejarahnya, sampai sekarang belum terungkap secara jelas dan lengkap. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian secara khusus dan saksama mengenai Kabuyutan Cipageran, agar diperoleh dokumentasi yang relatif lengkap dan komprehensif mengenai *kabuyutan* tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih peneliti ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Wali Kota Cimahi (2017-2022) Ir. Ajay M. Priatna, MM.dan Anggota DPRD Dedi Kuswandi, yang mendukung penuh penelitian ini berupa pembiayaan dan bentuk dukungan lainnya secara pribadi maupun melalui dinas teknis Diskominfo Arpus. Demikian juga ucapan terimakasih penulis haturkan kepada Prof. Dr. A. Sobana Hardjasaputra yang menjadi kontributor dalam beberapa informasi terkait Kabuyutan Cipageran Cimahi serta atas waktu luangnya untuk mendiskusikannya.

DAFTAR SUMBER

1. Laporan Penelitian

Hardjasaputra, A. Sobana dan Leli Yulifar 2017.

Kedudukan dan Fungsi Kabuyutan. Penelitian Pendahuluan Bandung: ttp

Yulifar, Leli. 2014.

Kabupaten Galuh-Ciamis 1809-1942 (Pemerintahan, Sosial-Ekonomi dan Politik). Unpad, Desertasi, ttp.

2. Buku

Barnes, Harry Elmer. 1963.

History of Historical Writing. Second Revised Edition New York: Dover Publications Inc.

Danasasmita, Saleh et al. 1983/1984. *Rintisan Penelusuran Masa Silam; Sejarah Jawa Barat*. jilid Ketiga. Bandung: Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Proyek Penerbitan Buku Sejarah Jawa Barat.

Garaghan, Gilbert J. 1946. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.

Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Kartodirdjo, Sartono. 1975. *Sejarah Nasional Indonrsia I*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kidoeng Soenda. 1878. Batavia: Bale Poestaka.

Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.

Lubis, Nina H. 1998. *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.

PaEni, Mukhlis (Ed. Umum). 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Renier, G.J. 1997. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Terjemahan A. Muin Umar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sjamsuddin, Helius. 2016. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Soekmono, R. 1995. *Sejarah Kebudayaan Indonesia, Jilid I*. Cetakan ke-11. Jogyakarta: Kanisius.

3. Internet

Kurniawan, Asep Indra. "Kabuyutan Solusi Kemajuan Bangsa yang Semakin Terancam". <http://www.Bedanews.com/kabuyutan-solusi-kemajuan-bangsa-yang-se-makin-terancam>. Diakses 11 Juni 2017.

Kusmayadi, Dedi E. 2015. "Pengertian Kabuyutan". <http://cipakudarmaja.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-kabuyutan.html>. Diakases 27 Agustus 2017.

Suryalaga, H.R. Hidayat. *Amanat Galunggung Prabuguru Darmasiksa*, <http://www.sundanet.com/artikel.php?id=117>. Diakses 31 Agustus 2-17.

4. Undang-Undang

UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya.

UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataaan.